

Strategi komunikasi kampanye program dewan pendidikan dan komite sekolah: : studi kasus pelaksanaan program dewan pendidikan dan komite sekolah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Wuwungan, Frankie, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=109329&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi kampanye Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (DP dan KS) dalam pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan melihat bagaimana pelaksanaan program DP dan KS di wilayah Depok dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Penelitian ini mengacu pada penerapan Keputusan Mendiknas nomor 0441U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta pembentukan DP dan KS berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 56 ayat 2) tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sukses tidaknya program tersebut dituntut adanya strategi komunikasi yang mampu membangun perilaku masyarakat untuk dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dimaksud. Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye program DP dan KS, penulis melakukan penelitian masalah strategi komunikasi kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan sejauh mana pelaksanaan program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di daerah Depok Jawa Barat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS, Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS dan sejauh mana pelaksanaan program DP dan KS di Kota Depok. Informan sebagai sumber informasi yang diteliti berasal dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Depok, Dewan Pendidikan Kota Depok, Kepala SD, dan masyarakat sekolah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan, menguraikan, mengolah dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yang dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen menggunakan saluran komunikasi massa (TV, Koran, dan Radio) disamping itu melalui Lokakarya maupun Seminar dengan melibatkan stakeholder pendidikan, juga disertai dengan penyebaran informasi melalui poster, leaflet, brosur yang disebar secara terbatas. Di samping itu juga melalui sosialisasi dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk sehingga pelaksanaan program DP dan KS dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Kesimpulan penelitian adalah dalam melakukan strategi kampanye program DP dan KS telah menggunakan media massa dan hasilnya sangat efektif untuk mengenalkan lembaga DP dan KS tersebut, namun demikian untuk dapat dipahami program DP dan KS tersebut perlu dilakukan model komunikasi selektif serta materi kampanye yang mempunyai kesan bagi khalayak. Komunikasi selektif dilakukan untuk memberikan informasi secara rinci tentang program DP dan KS serta untuk menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses pada media massa misalnya pada masyarakat di pedesaan.

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yaitu agar dilakukan lebih bervariasi misalnya melalui penayangan sinetran, sosialisasi langsung berupa penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran brosur, leaflet, newsletter yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum termasuk didaerah terpencil sekalipun. Untuk Dewan Pendidikan Kota Depok pelaksanaan program telah berjalan dengan baik namun untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu melakukan sosialisasi sendiri umpamanya melalui pembuatan billboard serta sosialisasi kepada dunia usaha untuk memperoleh dukungan partisipasinya dalam dunia pendidikan. Pada tingkat sekolah sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan-kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan operasional sekolah yang dianggap tidak mendukung adanya partisipasi masyarakat.